

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Ida Sang Hyang Widi Wasa karena rahmat dan karunia-nya kami dapat menyelesaikan Laporan Forum Konsultasi Publik tahun 2022 ini. Forum Konsultasi Publik merupakan salah satu unsur dari pelayanan publik dimana dalam Reformasi Birokrasi terdapat 8 (delapan) area perubahan utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah.

Agar dapat memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, maka setiap OPD Pelayanan Publik harus memiliki dan mempedomani standar pelayanan. Standar Pelayanan yang baik harus disusun melalui proses dan mekanisme penyusunan yang baik pula, yaitu melalui Forum Konsultasi Publik, dimana forum tersebut melibatkan masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan agar pelayanan yang diberikan selalu dapat diperbaiki dan menjadi lebih baik, sehingga Pelayanan Prima dapat tercapai dan kedepannya layanan akan semakin baik pula. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini merupakan jaminan pelayanan publik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bangli melaksanakan Forum Konsultasi Publik agar pelayanan prima dapat tercapai. Tema yang diangkat dalam Forum Konsultasi Publik adalah “Evaluasi Standar Pelayanan Disdukcapil Bangli Menuju Standar Pelayanan Dukcapil Bangli Era Baru” pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli.

Hasil Forum Konsultasi Publik ini merupakan bahan evaluasi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang di selenggarakan, serta mencari terobosan-terobosan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang.

Mengetahui

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bangli,

Ttd

Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si

NIP. 197210051992012001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	
BAB II HASIL PENYELENGGRAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK.....	
BAB III PENUTUP	
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat, sebagaimana diamanatkan UU No. 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Keikutsertaan masyarakat ini merupakan upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Peran serta tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik, yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik.

Dalam rangka memenuhi amanat undang-undang di atas serta terselenggaranya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dan optimal sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dengan tema “Pelayanan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)”. Pemilihan tema ini didasarkan pada pentingnya aspek pelayanan dalam administrasi kependudukan yang merupakan pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap Pemerintah Daerah.

B. Tujuan

Tujuan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli adalah :

1. Membahas permasalahan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Menyatukan pemahaman antara Pemerintah dengan Masyarakat dan Pihak eksternal lainnya yang berkepentingan agar pelayanan dapat terlaksana dengan baik
3. Membangun sinergitas, koordinasi antar lembaga dan perangkat daerah guna mendukung peningkatan pelayanan publik yang prima dan optimal dan kesamaan data.

C. Manfaat

Manfaat dari penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini adalah terciptanya saling pengertian dan kesepahaman tentang penyelenggaraan pelayanan publik, baik antara Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan masyarakat selaku penerima pelayanan. Dengan adanya kesepakatan ini proses penyusunan standar pelayanan dapat berjalan dengan baik, serta menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan kedua belah pihak.

D. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini adalah sebagai berikut :

1. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009.
4. Permenpan-RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

A. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup permasalahan yang dihadapi dalam Forum Konsultasi Publik Kabupaten Bangli meliputi permasalahan teknis penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tema yang diangkat adalah “Evaluasi Standar Pelayanan Disdukcapil Bangli Menuju Standar Pelayanan Dukcapil Bangli Era Baru”.

Berdasarkan pada tema, maka Forum Konsultasi Pulik ini lebih ditekankan kepada permasalahan yang berkaitan dengan proses Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan.

Masalah teknis yang paling sering dihadapi dalam pelayanan adalah mengenai Alur dan Prosedur, Persyaratan dan akses layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, dan Komunikasi Efektif antara Pihak Petugas Pelayanan Disdukcapil dengan masyarakat.

B. Pelaksanaan

1. Waktu dan Tempat Forum Konsultasi Publik Tahun 2022 :

Hari / Tanggal : Kamis/ 8 September 2022

Tempat : Ruang Rapat Arjuna Setda Kabupaten Bangli

2. Kegiatan

Pembukaan Dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, Dra. Anak Agung Bintang Ari Sutari, M.Si, dalam sambutannya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli Mengharapkan Forum Konsultasi Publik dapat menghasilkan kualitas pelayanan yang prima dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu peran aktif masyarakat dan peserta Forum Konsultasi Publik dengan memberi masukan-masukan dan saran guna mendapat solusi yang efektif dan tepat sasaran

Paparan disampaikan oleh Kabid Pencatatan Sipil dan Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli. Materi yang disampaikan adalah proses Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, teknis pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang cepat dan akurat agar kualitas data selalu terjaga, serta materi Komunikasi efektif antara pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Masyarakat penerima layanan.

C. Rencana Aksi

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam Forum Konsultasi Publik, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun rencana aksi. Rencana aksi tersebut disusun dan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Atas dasar komitmen untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan hal-hal berikut :

1. Menjelaskan mengenai prosedur dan tata cara penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil untuk semua jenis layanan yang akan dimasukkan pada perubahan standar pelayanan;
2. Seluruh staf pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli agar dapat menerapkan komunikasi yang baik dan efektif supaya timbul kepercayaan dari masyarakat yang menerima layanan.

BAB III

PENUTUP

Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli. Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik ini dapat membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal Pelayanan Pasien, dan peningkatan kepercayaan masyarakat.

Pelaksanaan hasil rencana aksi tentunya memerlukan waktu dan proses sehingga perlu melibatkan semua unsur dan pihak terkait agar dicapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Di samping itu hal paling penting untuk menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dan optimal sesuai standar pelayanan yang disepakati adalah komitmen pimpinan baik dari tingkat atas, menengah, sampai tingkat rendah. Sebagus dan sebaik apapun standar pelayanan yang disepakati, tanpa komitmen pimpinan tidak akan berdampak secara signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Oleh karenanya, agar forum konsultasi publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan di Kabupaten Bangli, partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua stakeholders sangat penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang ada di Kabupaten Bangli.